

PERSEPSI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PEMIMPIN PEREMPUAN

Siti Hafisah

14040254086 (Prodi S1-PPKn, FISH, UNESA) hafisah.14@gmail.com

Maya Mustika Kartika Sari

0014057403 (Prodi S1-PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan dan harapan pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo terhadap pemimpin perempuan. Penelitian ini menggunakan teori persepsi yang dikemukakan oleh Brunner. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian yaitu pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo dan terdapat 13 informan dalam penelitian ini. Pemimpin perempuan yang dimaksud adalah berkaitan dengan momentum Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur tahun 2018 dimana masing-masing calon kandidat memiliki wakil perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula menganggap bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin karena memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Terhadap perempuan yang menjadi kepala daerah, beberapa menyatakan setuju dan beberapa beranggapan bahwa pemimpin perempuan tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Terhadap pencalonan pada Pilkada Jatim 2018, pemilih pemula menganggap bahwa yang pantas menjadi pemimpin adalah laki-laki. Perempuan lebih baik menduduki jabatan wakil sehingga bisa saling melengkapi. Pemilih pemula juga tidak mempermasalahkan apabila tidak ada calon perempuan dalam Pilkada tersebut. Harapan pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo terhadap pemimpin perempuan adalah pemimpin perempuan harus sempurna, mampu mewujudkan pola pikir masyarakat yang kreatif, dan pemimpin perempuan harus melek teknologi.

Kata Kunci: Persepsi, Pemilih Pemula, Pemimpin Perempuan

Abstract

This study is aim to describe response and expectation of beginner voters in Ponorogo Regency against women leader. This study use the perception theory proposed by Brunner. This research is qualitative research with description method. Informants in this study are beginner voters in Ponorogo Regency and there are 13 informants in this study. The meaning of female leader in this study is related to the momentum of Java Regional Head Election in 2018 where each candidate has a female representative. Data collection technique are carried out by interview and documentation method. Data analysis technique in this study are data reduction, data presentation, and data verification. Source triangulation was used to verify data's validity. The results of the study shows that beginner voters consider that women can be leader because they have same rights and position as men. Against women who are regional head, some of them said agree and some of them think that women leader are not corresponding with the teachings in Qur'an. Against the nomination in 2018 East Java Regional Election, new voters consider that who is worthy to being a leader is men. It is better for women to occupy deputy position so they can complement each other. Beginner voters also didn't question if there isn't female candidate in that election. The hope of the beginner voters in Ponorogo Regency towards women leaders is women leader must be perfect, able to realize the mindset of creative people, and women leaders must be technologically literate.

Keyword: Perception, Beginner voters, Female Leaders

PENDAHULUAN

Perempuan dalam masyarakat umumnya masih dipandang sebagai sosok feminim yang mengharuskannya untuk bersikap dan berperilaku sebagaimana mestinya. Kentalnya budaya patriaki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat sentral dalam kehidupan sosial membuat masyarakat memiliki

konstruksi bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan perempuan.

Kondisi perempuan di Indonesia mengalami perubahan. Perempuan tidak lagi berada dalam sektor domestik yang berkaitan dengan aktivitas rumah tangga saja. Terdapat perempuan yang saat ini sudah memasuki sektor publik dengan beragam pekerjaan dan jabatan yang diembannya sehingga tugas perempuan selain

menjadi ibu rumah tangga juga memiliki tugas sebagai pemimpin.

Selain itu juga, saat ini kedudukan perempuan di bidang politik mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah Indonesia. Adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) menunjukkan bahwa terdapat upaya dari pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan mengingat kedudukannya sangat penting dalam kesejahteraan keluarga maupun dalam pembangunan masyarakat.

Kedudukan perempuan dalam bidang politik semakin diperkuat dengan adanya UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Meskipun pada kenyataannya, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tidak mencapai kuota 30%. Komposisi perempuan pada setiap fraksi di DPR RI dan jumlah perempuan pada setiap periode DPR RI terus berubah. Hasil pemilu 2014 terpilih 97 orang perempuan atau sekitar 17,3% dari 560 anggota DPR RI. Jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan dari periode sebelumnya dimana terdapat 99 perempuan atau sekitar 17,7%.

Hal serupa juga terjadi pada keanggotaan DPRD Ponorogo. Anggota DPRD Ponorogo periode 2014-2019 masih didominasi oleh anggota lama yaitu berjumlah 27 orang sementara 18 orang adalah anggota baru. Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ponorogo hanyalah 11%. Persentase tertinggi hanya 20% oleh Partai Golongan Karya. Dari 45 anggota dewan, komposisi keterwakilan perempuan hanya 5 orang saja. Hal ini berarti bahwa kuota 30% keterwakilan perempuan juga belum terpenuhi. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya yang terdapat 7 orang perempuan yang menduduki kursi dewan. Dari keseluruhan jumlah Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Timur, komposisi keterwakilan perempuan di DPRD, Ponorogo menempati posisi ke 28 dari 38 Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan di daerah Ponorogo ini masih rendah.

Selain mengacu pada keterwakilan perempuan di kursi dewan, kiprah perempuan di sektor publik juga nampak pada dipangkunya jabatan menteri oleh perempuan. Posisi perempuan di badan eksekutif khususnya di jabatan kabinet perempuan yang menjabat sebagai menteri jumlahnya relative lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Semenjak tahun 1946 pada masa pemerintahan Sutan Sjahrir hingga tahun 2014

pada masa pemerintahan Joko Widodo terdapat sekitar 33 perempuan yang menduduki jabatan menteri. Hasil Penelusuran Tim Riset Tirta (2017) juga menunjukkan bahwa terdapat 59 perempuan yang menjadi Kepala Daerah atau 5,35% dari total 1084 Kepala Daerah di Indonesia. Nampak bahwa peran laki-laki dalam struktur kepemimpinan masih mendominasi meskipun saat ini tidak sedikit perempuan yang berpendidikan tinggi (<http://tirta.id>, diakses 23 Januari 2018).

Kepemimpinan masih sering dianggap sebagai ranah kaum laki-laki. Hal ini dikarenakan pandangan patriaki yang masih kuat dan praktek dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki dalam posisi tataran tertinggi. Stereotipe gender yang dilekatkan pada perempuan misalnya tidak tegas, lamban mengambil keputusan, dan lemah dipadukan dengan nilai-nilai androsentisme yang tetap membelenggu hal-hak dan kebebasan perempuan maupun nilai-nilai keagamaan yang mengusung konsep patriaki, mempertegas bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Argumentasi-argumentasi tersebut menjadi alasan yang signifikan menolak perempuan menduduki jabatan strategis di lembaga politik formal dan kepemimpinan perempuan sulit mendapat pengakuan di arena politik (Sihite, 2007:163).

Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilihan Kepala Daerah) Jawa Timur 2018, persaingan politik menjadi sengit. Masing-masing calon kandidat memiliki calon perempuan yaitu Khofifah Indar Parawansa yang mendaftar sebagai pasangan calon Gubernur berpasangan dengan Emil Dardak sebagai calon Wakil Gubernur. Pesta demokrasi yang biasa disebut dengan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam ranah politik. Batas usia untuk dapat berpartisipasi pada pemilu adalah 17 tahun yang dimasukkan dalam kelompok pemilih pemula.

Menurut Setiajidi (2011:19), empat alasan mendasar yang menyebabkan pemilih pemula mempunyai kedudukan dan makna strategis dalam pemilihan umum adalah a) alasan kualitatif yaitu bahwa pemilih pemula merupakan kelompok yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relative lebih banyak dari setiap pemilihan umum, b) pemilih pemula adalah satu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur atau diprediksi, c) kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan lebih condong menjadi golput karena kebingungan dengan banyaknya pilihan partai politik yang akhirnya menjadikan mereka tidak memilih sama sekali, dan d) masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai politik untuk mempengaruhi pemilih pemula.

Berkaitan dengan momen Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur tahun 2018 tersebut, menarik untuk diteliti bagaimana persepsi pemilih pemula terutama di Kabupaten Ponorogo terhadap pemimpin perempuan. Pada Pilgub Jawa Timur 2018 sesuai keputusan KPU Jawa Timur No. 7/PP.01.2-Kpt/35/Prov/IX/2017 ditetapkan bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir adalah sebesar 30.963.078 pemilih (<http://cakrawalanews.com>, diakses 13 Januari 2018).

Ponorogo menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang sampai saat ini belum ada pemimpin atau kepala daerah perempuan yang memimpin pemerintahannya. Bahkan dalam Pemilihan Umum Bupati Ponorogo tahun 2015 tidak ada satupun wakil perempuan yang mencalonkan diri. Hal ini membuat masyarakat daerah Ponorogo dirasa kurang memiliki pengalaman berada dibawah kepemimpinan perempuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menarik untuk melakukan penelitian mengenai Persepsi Pemilih Pemula di Kabupaten Ponorogo terhadap Pemimpin Perempuan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang "Persepsi Pemilih Pemula di Kabupaten Ponorogo Terhadap Pemimpin Perempuan."

Persepsi menurut Walgito (2004:88) merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Kemudian stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut dengan proses persepsi. Proses persepsi tidak bisa lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 Nomor 22 menyatakan bahwa "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin". Kemudian pasal 19 mempertegas bahwa yang mempunyai hak pilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun dan didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang berumur 17 tahun dan didaftar oleh penyelenggara pemilu yang memberikan hak suaranya pertama kali pada pemilihan umum.

Pemimpin menurut Kartini (2005:39) adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa

pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Sedangkan Perempuan secara etimologis berasal dari kata "empu" yang berarti "tuan", orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Menurut Zaitunan Subhan (2004), perempuan berasal dari kata "empu" yang artinya dihargai. Kata wanita berasal dari Bahasa Sansakerta, dengan dasar kata *Wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori persepsi oleh Brunner. Brunner (dalam Sarwono, 2015: 89) menyatakan bahwa persepsi adalah proses pengkategorisasian. Organisme dirangsang oleh suatu masukan tertentu (objek-objek di luar, peristiwa, dan lain-lain) dan organisme itu berespon dengan menghubungkan masukan itu dengan salah satu kategori (golongan) objek-objek atau peristiwa-peristiwa. Proses pengambilan keputusan menurut Brunner (dalam Sarwono, 2015: 89) terdapat empat tahap yaitu a) kategoris primitive yaitu objek atau peristiwa diamati, diisolasi, dan ditandai berdasarkan ciri-ciri khusus. b) mencari tanda (*cue search*) yaitu pengamat secara cepat memeriksa (*scanning*) lingkungan untuk mencari informasi-informasi tambahan yang memungkinkannya untuk melakukan kategorisasi yang tepat. c) konfirmasi yaitu terjadi setelah objek mendapatkan penggolongan sementara. Pada tahap ini pengamat tidak lagi terbuka untuk sembarang masukan, melainkan hanya menerima tambahan informasi yang akan memperkuat (mengkonfirmasi) keputusannya. Dan d) konfirmasi tuntas yaitu diakhirinya proses pencarian tanda-tanda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk mendeskripsikan persepsi pemilih pemula terhadap pemimpin perempuan.

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo. Kelompok umur yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 17-21 tahun yang termasuk dalam kelompok pemilih pemula. Berdasarkan data KPU, terdapat sejumlah 62.232 orang pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling. Dalam penelitian ini terdapat 13 informan dengan kriteria pemilihan informan yaitu WNI yang berumur 17-21 tahun, belum pernah mengikuti pemilihan umum sebelumnya, memiliki hak pilih, terdaftar di DPT pada Pilkada Jatim 2018, aktif di kegiatan atau organisasi sosial, dan bersedia menjadi informan.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semiterstruktur untuk menggali persepsi pemilih pemula terhadap pemimpin perempuan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data selama penelitian dan sebagai bukti penguat bahwa wawancara telah dilakukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015:91) yaitu *data reduction, data display, dan conclusion/verification*.

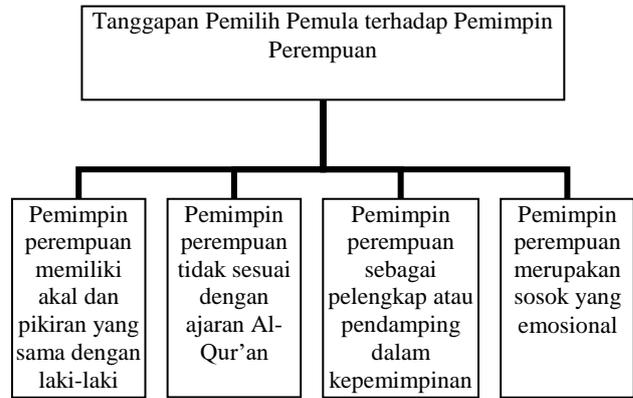
Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten maka diperlukan pengecekan data untuk memastikan data tersebut valid atau tidak sehingga diperlukan teknik keabsahan/kevalidan data (Moleong, 2008:326). Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2015:241) triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan memaparkan persepsi pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo yang berupa tanggapan dan harapan mengenai pemimpin perempuan. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris (Walgito, 2004:88). Sehingga dapat dipahami bahwa persepsi adalah tanggapan terhadap suatu hal yang telah terjadi yang dapat bersifat positif maupun negatif. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan dan harapan pemilih pemula terhadap pemimpin perempuan. Sedangkan pemimpin perempuan yang dimaksud adalah berkaitan dengan momentum Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur tahun 2018 dimana masing-masing calon kandidat memiliki wakil perempuan.

Tanggapan Pemilih Pemula Terhadap Pemimpin Perempuan

Berikut ini merupakan bagan mengenai tanggapan pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo terhadap pemimpin perempuan.



Bagan 1. Tanggapan Pemilih Pemula tentang Pemimpin Perempuan

Pertama, perempuan berakal dan pikiran. Pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo memiliki persepsi bahwa perempuan juga mampu menjadi seorang pemimpin. Secara rohaniah, perempuan dan laki-laki memiliki aspek yang sama yaitu akal dan pikiran. Akal berfungsi untuk membedakan yang salah dan benar serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya tergantung pada luasnya pengalaman dan pendidikan. Sedangkan pikiran adalah hasil dari berpikir. Sehingga dalam hal ini manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan membedakan mana yang benar salah, serta mampu menganalisis. Dengan bekal itulah informan menganggap bahwa perempuan juga mampu memimpin karena memiliki akal dan pikiran yang sama juga dimiliki oleh laki-laki. Hal ini sesuai pendapat Rusiana (21 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Mampu, karena sebenarnya manusia yang lahir di dunia diberikan dua bekal yang sama yaitu akal dan pikiran baik laki-laki maupun perempuan. Jika jiwa perempuan adalah seorang pemimpin maka tidak ada salahnya memimpin suatu daerah.” (wawancara Minggu, 10 Juni 2018)

Sependapat dengan Rusiana, Pandu Prabowo (20 tahun) menyatakan bahwa setiap orang memiliki suatu kesetaraan yang sama dari Tuhan untuk hidup sebagai manusia insankamil. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan adalah sama karena mereka dibekali dengan akal dan pikiran sebagai manusia insankamil. Sehingga dalam menjadi pelaku kepemimpinan, laki-laki dan perempuan juga memiliki kedudukan yang sama.

Dari perspektif hukum, Riska Mardiana (21 tahun) beranggapan bahwa hukum Indonesia berlaku sama sehingga tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam menjadi pemimpin. Ia berpendapat bahwa dalam hal memimpin, perempuan juga bisa turut berperan. Ia mengungkapkan:

“Bisa saja, karena di Indonesia semua hukum berlaku sama antara laki-laki dan perempuan. Mereka bisa memimpin suatu daerah asalkan mereka mampu untuk memimpin dan bertanggung jawab dan amanah.” (wawancara Minggu, 27 Mei 2018)

Secara hukum, aturan-aturan di dalamnya berlaku sama bagi seluruh Warga Negara. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama sebagai Warga Negara. Sehingga perempuan dianggap mampu menjadi pemimpin. Karena dalam hukum pun tidak ada yang membatasi siapa pelaku kepemimpinan. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak untuk menjadi pemimpin.

Sedangkan dari perspektif gender, M. Wahid Arbianto (19 Tahun) berpendapat bahwa untuk memimpin, perempuan dinilai sangat bisa, karena sekarang perempuan bukanlah perbedaan gender. Kesetaraan gender memandang bahwa setiap orang harus menerima perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Antara perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama dan hak-hak yang sama sebagai manusia.

Dengan adanya kesetaraan gender, setiap manusia memiliki kesempatan untuk ikut serta berperan dalam bidang kehidupan baik di kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, pendidikan, maupun pertahanan dan kemananan nasional. Sehingga perempuan juga mampu dan memperoleh kesempatan untuk menjadi pemimpin.

M. Wahid memberikan contoh bahwa Srikandi Indonesia (Bu Risma, Khofifah, Susi, dan Sri Mulyani) adalah bukti nyata pemimpin perempuan. M. Wahid berpendapat bahwa pemimpin perempuan yang ideal adalah pemimpin perempuan yang bisa menjalankan kepemimpinannya seperti Bu Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) dan Bu Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan RI).

Walaupun tanggapan pemilih pemula sangat beragam, namun dapat ditarik kesimpulan dalam satu tanggapan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki bekal yang sama dari penciptanya yaitu akal dan pikiran serta kedudukan yang setara baik secara hukum maupun gender. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Karena pada dasarnya kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan oleh setiap orang.

Kedua, pemilih pemula beranggapan bahwa pemimpin perempuan tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini membawa perubahan pola pikir terutama pemilih pemula yang masih mengenyam pendidikan sehingga mereka mampu melihat realitas yang terjadi di masyarakat saat ini dari berbagai perspektif. Beberapa pemilih pemula tidak menyetujui apabila perempuan menjabat sebagai kepala daerah. Alasan pemilih pemula yang tidak

menyetujui persoalan ini adalah salah satunya didasarkan pada ajaran Al-Quran yang mengatur bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah seorang laki-laki. Hal ini sesuai dengan pendapat Milenah (19 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Mungkin kalau saya tidak setuju, sebab di Al-Quran itu kan sudah dijelaskan mbak kalau laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Sepintar-pintarnya wanita kalau sudah berkeluarga harus tunduk, patuh terhadap laki-laki. Dan jika memimpin suatu daerah ia memimpin banyak orang sementara wanita itu kan harus tunduk ke laki-laki. Ya emang benar sih jaman sekarang sudah menjadi emansipasi wanita. Kalau perempuan yang menjadi pemimpin kurang maksimal dalam menjalankan pemerintahannya, itu menurutku mbak.” (wawancara Minggu, 10 Juni 2018)

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Umi Rohmawati (19 tahun). Ia berpendapat bahwa:

“Sebaiknya seorang pemimpin adalah dari seorang laki-laki, karena lebih wibawa dalam mempengaruhi rakyat. Selama masih ada laki-laki maka lebih baik dari kaum laki-laki aja.” (wawancara Rabu, 30 Mei 2018)

Surya Ma'ruf (19 tahun) juga mengungkapkan pendapatnya terkait perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah. Ia menyatakan:

“Ya selama itu baik dan jika tidak menimbulkan suatu masalah tertentu, tidak papa. Tetapi jika di daerah itu yang layak laki-laki, ya mending laki-laki.”

Beberapa pemilih pemula juga memilih laki-laki untuk dijadikan sebagai pemimpin. Hal ini dikarenakan stereotipe masyarakat yang menganggap laki-laki lebih kuat dari pada perempuan dan budaya patriaki yang menempatkan laki-laki di atas perempuan masih menguat pada pemilih pemula yang notabene mereka juga merupakan bagian dari masyarakat. Pendapat mereka juga tentunya diperkuat dengan alasan yang berdasar pada kajian ilmu dan ajaran yang mereka anut. Sebagian dari mereka masih memegang erat ajaran Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan pendapat Riska Mardiana (21) tahun ketika diminta memilih pemimpin perempuan atau laki-laki. Ia menyatakan:

“Lebih milih laki-laki sih mbak. Karena laki-laki dalam Al-Qur'an dijadikan sebagai pemimpin.” (wawancara Minggu, 27 Mei 2018)

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Milenah (19 tahun):

“Saya milih laki-laki mbak. Karena di Al-Qur'an juga sudah dijelaskan laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, dan laki-laki lebih maksimal dalam menjalankan sebuah

pemerintahan.” (wawancara Minggu, 10 Juni 2018)

M. Fikri Nugroho (20 tahun) berpendapat bahwa perempuan lebih tepat menempati posisi sebagai wakil. Ia menyatakan bahwa:

“Memilih laki-laki, ya gimana-gimana ya laki-laki lah yang sebagai pemimpin. Kalau perempuan ya kurang tepat, mungkin kalau disandingkan sebagai wakil itu bisa. Kalau pemimpin ya menurut saya kalo bisa laki-laki.” (Wawancara Rabu, 20 Juni 2018)

Muhammad Atta Amar (18 tahun) juga memilih laki-laki. Menurutnya, kodrat pemimpin adalah seorang laki-laki. Ia menyatakan bahwa:

“Kalo saya sih lebih milih laki-laki, karena kalo laki-laki itu berdasarkan kodratnya ya biasanya pemimpin. Harus tegas.” (wawancara Kamis, 21 Juni 2018).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa beberapa pemilih pemula tidak menyetujui adanya perempuan yang menjabat sebagai pemimpin atau Kepala Daerah salah satunya yaitu berdasarkan ajaran Al-Qur'an yang menerangkan bahwa sebaiknya pemimpin adalah laki-laki. Selain itu, laki-laki juga dinilai lebih berwibawa sehingga lebih pantas menjadi seorang pemimpin. Apabila di daerah tersebut masih ada laki-laki dan masih layak dipimpin oleh seorang laki-laki maka yang menjadi pemimpin lebih baik dari kaum laki-laki saja. Perempuan bisa menjabat sebagai kepala daerah namun dijadikan sebagai pilihan kedua.

Ketiga, Perempuan lebih baik menjadi pendamping atau pelengkap dalam kepemimpinan. Pemilih pemula berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada masalah ketika perempuan menduduki jabatan pemimpin, namun lebih baiknya jika pemimpin itu dijabat oleh laki-laki dan perempuan sebagai wakilnya sehingga diantaranya keduanya bisa saling melengkapi. Hal ini seperti pendapat Fadzilah Lailatus Sa'adah (19 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Kalo saya sih lebih *prefer* ke latar belakangnya. Mungkin ada yang lebih unggul di pengalaman organisasi. Kalo saya sih kalo perempuan mending ke wakil aja. Karena perempuan itu bisa mendukung dan laki-laki lebih bisa profesional, *teges* (tegas).” (wawancara Kamis, 21 Juni 2018)

Menurut Fadzilah, dalam pencalonan tersebut lebih baik dilihat bagaimana latar belakang kandidat. Membandingkan kandidat satu dengan yang lain sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi keunggulan antar masing-masing kandidat. Pada pencalonan tersebut nampak bahwa kandidat nomor satu lebih memiliki

kualifikasi baik dari segi pendidikan maupun pengalaman yang lebih unggul dibandingkan dengan rivalnya.

Meskipun demikian Fadzilah berpendapat bahwa perempuan lebih baik memegang jabatan wakil saja. Pemimpin direpresentasikan sebagai jabatan yang harus dipegang oleh orang yang tegas yang identik dengan laki-laki dan diperlukan adanya pendorong atau pendukung dimana hal tersebut bisa dilakukan oleh pihak perempuan.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Surya Ma'ruf (19 tahun). Selain itu, Surya juga menyadari bahwa perempuan juga dibutuhkan perannya dalam kepemimpinan. Sehingga laki-laki dan perempuan bisa bekerja sama dalam kepemimpinan untuk saling melengkapi dan mengimbangi. Ia menyatakan:

“Ya itukan sudah menjadi suatu bukti kalo perempuan itu juga penting dalam kehidupan jadi harus ada yang mengimbangi. Itu saling melengkapi jadi dari perempuan atau laki-laki itu sama aja, saling melengkapi.” (wawancara Rabu, 20 Juni 2018).

M. Wahid Arbianto (19 tahun) pada wawancara Selasa, 5 Juni 2018 juga berpendapat bahwa pada pencalonan Kepala Daerah Jawa Timur tahun 2018 tersebut antara laki-laki dan perempuan bisa saling melengkapi.

Informan juga diminta pendapat apabila tidak ada calon perempuan dalam Pilgub Jatim 2018 tersebut. Mayoritas pemilih pemula juga tidak mempermasalahkannya karena menurut mereka jenis kelamin bukannya hal yang penting. Yang terpenting adalah bagaimana perempuan tersebut bisa profesional terhadap pekerjaannya selain menjadi ibu rumah tangga dan kodratnya sebagai perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Fadzilah Lailatus Sa'adah (19 tahun) mengenai pencalonan kepala daerah Jawa Timur 2018, ia menyatakan:

“Gak Masalah. Yang penting itu tadi, dia profesional. Dia tahu tempat, dia bisa menempatkan hukum seadil-adilnya. Menurut saya itu sudah cukup.” (wawancara Kamis, 21 Juni 2018)

Astri Qurrota'ayunnina (19 tahun) berpendapat bahwa tidak masalah dengan pencalonan tersebut. Karena menurutnya, Pemimpin tidak memandang gender. Sehingga tidak ada keharusan siapa yang memegang jabatan pemimpin. Karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki adalah sama. Begitupun dalam hal kepemimpinan, tidak ada yang berpihak ke satu sisi.

Umi Rohmawati (19 tahun) berpendapat bahwa tidak masalah jika tidak ada kandidat perempuan dalam pemilihan umum tersebut karena seorang pemimpin lebih

baik seorang laki-laki. Pendapat senada diungkapkan oleh M. Fikri Nugroho (20 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Kalo saya ya biasa *ae* (saja). Kalo ada perempuannya sebenarnya tetep kurang setuju. Jadi ya nggak masalah *nek* (kalau) menurut saya.” (wawancara Rabu, 20 Juni 2018)

Milenah (19 tahun) juga menyatakan pendapat yang serupa, yaitu:

“Menurut saya, jika tidak ada perempuan yang patut untuk menjadi pemimpin yang baik ya tidak apa-apa. Karena hakikatnya yang patut menjadi pemimpin itu laki-laki.” (wawancara Minggu, 10 Juni 2018)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilih pemula tidak memperlakukan apabila tidak ada calon perempuan yang mewakili dalam Pemilihan Kepala Daerah Jatim 2018. Beberapa pemilih pemula menanggapi bahwa yang pantas menjadi pemimpin adalah laki-laki. Kalaupun ada perempuan, mungkin lebih baik apabila perempuan tersebut menduduki jabatan wakil sehingga antara Kepala dan Wakil Kepala bisa saling melengkapi.

Keempat, perempuan adalah sosok yang emosional. Sebagai seorang manusia biasa, meskipun pemimpin dianggap memiliki posisi lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya, mereka juga tidak lepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan. Terlebih lagi apabila perempuan menjadi pemimpin. Stereotipe masyarakat mengenai perempuan tidak menutup kemungkinan mereka juga menanggapi bahwa perempuan memiliki banyak kekurangan ketika menjadi pemimpin.

Kelebihan dari pemimpin perempuan adalah sifat emosionalnya. Sebagian pemilih pemula menanggapi justru sifatnya yang emosional tersebut menjadi suatu kelebihan tersendiri bagi pemimpin perempuan. Dengan sifatnya yang perasa tersebut pemimpin perempuan dinilai lebih mengerti keadaan anggotanya karena dianggap mampu merasakan apa yang dirasakan masyarakatnya. Kekurangan perempuan ketika menjadi pemimpin juga terletak pada perasaan emosionalnya. Hal ini seperti pendapat Milenah (19 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Kelebihan seorang perempuan itu terletak pada perasaannya mbak *nek* (kalau) menurutku, pemimpin perempuan mungkin lebih mengerti suara hati rakyatnya. Jadi lebih bisa merasakan penderitaan rakyatnya yang mampu.” (wawancara Minggu, 10 Juni 2018)

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Riska Mardiana (21 tahun) mengenai sifat yang emosional dari perempuan. Ia menyatakan:

“Akan lebih peka terhadap kaum miskin karena seorang wanita diciptakan memiliki naluri rasa yang lebih dibanding pria atau

lebih bisa memajukan daerahnya dari segala sisi.” (wawancara Minggu, 27 Mei 2018)

Selain memiliki sifat yang emosional, perempuan juga identik dengan sifatnya yang kadang banyak bicara. Hal ini nampak ketika sesama perempuan sedang berkomunikasi membahas suatu hal. Namun sifat tersebut juga menjadi kelebihan bagi pemimpin perempuan karena tidak akan segan-segan untuk mengomeli atau menegur bawahannya yang kurang benar dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Rifa'i (17 tahun) yang menyatakan bahwa kelebihan perempuan adalah:

“Perempuan kan biasanya banyak bicara, nah kelebihan itulah yang menjadi nilai tambah bagi seorang pemimpin perempuan.”

Fadzilah Lailatus Sa'adah (19 tahun) menanggapi bahwa sifat perempuan yang emosional bisa menjadi hal yang positif maupun negatif. Artinya, sifat emosional perempuan bisa menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya ketika menjabat sebagai pemimpin. Ia berpendapat bahwa:

“Ya kalo saya itu tadi. Emosional. Jadi emosional itu ada dampak positifnya, ada negatifnya. Kaya gini, kalo kita disakiti kita bisa *teges* (tegas), gitu. Kita bisa *teges* (tegas) ini salah kamu ini hukuman kamu, udah.”

Kekurangan perempuan ketika menjadi pemimpin juga terletak pada perasaan emosionalnya. Beberapa pemilih pemula berpendapat bahwa sifat emosional seorang perempuan bisa menjadi kelebihannya ketika menjadi pemimpin. Namun beberapa pemilih pemula lain menanggapi hal ini sebagai kekurangannya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Astri Qurrota'ayunnina (19 tahun) yang menyatakan bahwa kekurangan perempuan ketika menjadi pemimpin adalah “Perempuan cenderung memiliki suasana hati yang *moodyan*.” (wawancara Senin, 11 Juni 2018). Pendapat tersebut senada dengan pendapat M. Wahid Arbianto (19 tahun) dan Pandu Prabowo (20 tahun).

Riska Mardiana (21 tahun) menyatakan bahwa kekurangan perempuan ketika menjadi pemimpin adalah “Mudah lelah dan cepat terserang stress.” (wawancara Minggu 27 Mei 2018). Selain kondisi fisik perempuan yang lemah, perempuan juga dinilai kurang memiliki kewibawaan sehingga dianggap kurang mampu dalam mempengaruhi anggota yang dipimpinnya terutama dalam suatu pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Milenah (19 tahun) yang berpendapat bahwa kekurangan pemimpin perempuan adalah “Kurang tegas mungkin, dan kurang bijak dalam mengambil sebuah keputusan.” (wawancara Minggu, 10 Juni 2018).

Pendapat tersebut senada dengan pendapat Umi Rohmawati (19 tahun) yang menyatakan bahwa kekurangan pemimpin perempuan adalah:

“Kurang memiliki jiwa yang berwibawa, sehingga kurang mampu mempengaruhi atau menjalankan suatu pemerintahan.” (wawancara Rabu, 30 Mei 2018).

M. Rifa’i (17 tahun) juga berpendapat bahwa pemimpin perempuan itu kurang tegas. Namun hal itu tidak memberikan jaminan bahwa pemimpin perempuan tidak mempunyai ketegasan. Begitu pun dengan pemimpin laki-laki yang dirasa belum tentu juga memiliki kepribadian yang tegas. Ia berpendapat bahwa kekurangan pemimpin perempuan adalah “Kurang begitu tegas, tapi itu belum menjaminkannya juga sih.” (wawancara Selasa, 29 Juni 2018).

Beberapa pemilih pemula yang lain juga memiliki pendapat yang hampir sama mengenai kekurangan pemimpin perempuan. Seperti pendapat Muhammad Atta Amar (18 tahun) yang menyatakan “Mungkin kebanyakan kalo perempuan itu terlalu lembut, kurang tegas lah, kebanyakan”. Surya Ma’ruf (19 tahun) juga berpendapat serupa. Surya menyatakan kekurangan pemimpin perempuan adalah “Mungkin terlalu lemah lembut, kemudian ada kejadian korupsi atau apa itu kurang kecerdasan.” (wawancara Rabu, 20 Juni 2018).

Hal lain yang menjadi kekurangan perempuan ketika menjadi seorang pemimpin adalah lebih mudah tergoda. Hal ini seperti pendapat Fadzilah Lailatus Sa’adah (19 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Kalo kekurangannya.. gampang tergoda sih. Misalnya kalo perempuan itu kan liat apa yang bagus pengen beli, pengen itu. Jadi kalo ada sesuatu mungkin kayak yaudah aku ambil, kenapa nggak, gitu. Padahal yang diambil itu belum tentu baik, gitu.” (wawancara Kamis, 21 Juni 2018).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Eko Susilo (17 tahun) yang menyatakan bahwa pemimpin perempuan “Mudah goyah dengan jabatan.” (wawancara Selasa, 29 Juni 2018).

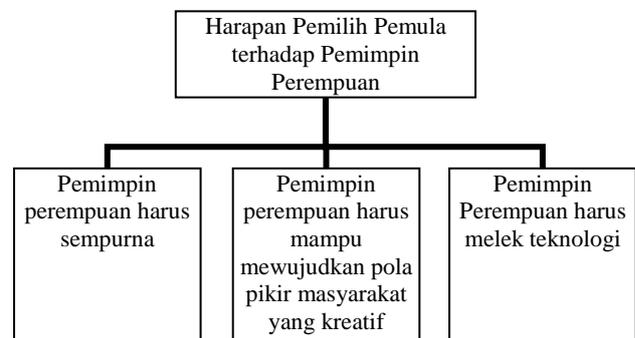
Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pemilih pemula masih menganut pandangan tradisional mengenai penggambaran sosok perempuan. Gambaran perempuan dari sudut pandang kajian medis, psikologi, dan sosial bisa disebabkan karena dua faktor yaitu faktor fisik dan psikis. Dari segi fisik, perempuan lebih kecil daripada laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan menjadi lebih dini, kekuatan perempuan pun tidak sekuat laki-laki. Perempuan dipandang memiliki sikap yang kalem, dan lebih perasa atau bahkan cepat lelah juga pingsan apabila menghadapi persoalan-persoalan yang berat (Muthahari, 1995:107).

Dengan berbagai kondisi fisik tersebut, dikhawatirkan perempuan akan lebih cepat lelah. Apalagi ketika menjadi pemimpin, banyak persoalan yang harus ditangani.

Beberapa pemilih pemula menanggapi perasaan perempuan yang sensitif atau emosional menjadi suatu kelebihan bagi perempuan ketika menjadi pemimpin. Karena dinilai lebih mengerti dan peka terhadap apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Namun kelemahan-kelemahan tersebut tidak mempengaruhi pandangan pemilih pemula terhadap kemampuan perempuan menjadi pemimpin. Artinya, terlepas dari kelemahan-kelemahan tersebut pemilih pemula masih menyadari bahwa perempuan juga memiliki hak untuk memimpin karena pemimpin laki-laki pun pasti juga memiliki kekurangan dalam menjalankan kepemimpinannya.

Harapan Pemilih Pemula Terhadap Pemimpin Perempuan

Berikut ini merupakan bagan harapan pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo terhadap pemimpin perempuan.



Bagan 2. Harapan Pemilih Pemula Terhadap Pemimpin Perempuan

Pertama, pemimpin perempuan harus sempurna. Pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo masih memiliki penggambaran tradisional mengenai sosok pemimpin perempuan. Pemilih pemula masih beranggapan bahwa perempuan adalah sosok yang lemah dan kurang tegas. Padahal ketika menjadi pemimpin, seseorang harus berusaha untuk sempurna dan memenuhi kriteria pemimpin sesungguhnya.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula berharap supaya pemimpin perempuan bisa sempurna dalam menjalankan kepemimpinannya mulai dari gaya kepemimpinan, kepribadian, dan kinerjanya. Sehingga pemimpin perempuan bisa mengubah perspektif masyarakat tentang sosok pemimpin perempuan. Bahwa perempuan bisa profesional menempatkan dirinya ketika menjadi pemimpin dan tidak menyimpang dari kodratnya sebagai perempuan.

Sebagai negara yang demokratis, tentunya pemerintahan juga harus dijalankan secara demokratis, mengedepankan dan mengutamakan kepentingan-kepentingan dan hak-hak rakyatnya. Memegang teguh nilai-nilai demokrasi sehingga terwujud kepemimpinan yang diharapkan oleh pemilih pemula. Sesuai dengan pendapat Milenah (19 tahun), ia mengharapkan gaya kepemimpinan:

“Yang merakyat, mau terjun ke daerah pimpinannya, perhatian terhadap rakyatnya dan yang paling penting janji-janji yang dulu diucapkan bisa ditepati tidak hanya sekedar janji-janji manis belaka.” (wawancara Minggu, 10 Juni 2018)

Senada dengan pendapat Milenah, Surya Ma'ruf (19 tahun) juga mengharapkan gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin perempuan yang:

“Paling penting itu menyertakan semua kalangan. Maupun kalangan atas, menengah, bawah, harus disetarakan. Kemudian adil. Adil dalam hal apa, contohnya, kalo kalangan atas korupsi harusnya ditindak dengan adil, bukan hanya kaum menengah ke bawah. Itu sudah kelewatan kalo hukumannya terlalu berat dibandingkan yang korupsi-korupsi itu.” (wawancara Rabu, 20 Juni 2018).

M. Wahid Arbianto (19 tahun) juga mengharapkan gaya kepemimpinan yang sama, yaitu pemimpin yang ingat sama rakyatnya, langsung turun ke lapangan. Eko Susilo (17 tahun) mengharapkan gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin yang loyal dan berkecimpung dalam masyarakat. Muhammad Atta Amar (18 tahun) mengharapkan gaya kepemimpinan yang:

“Ya turun ke masyarakat, itu. Bisa lihat rakyatnya pokoknya biar makmur itu gimana, dipikirin.” (wawancara Kamis, 21 Juni 2018).

M. Fikri Nugroho (20 tahun) juga mengharapkan pemimpin perempuan yang:

“Ya paling tidak mereka mau berbaur sama masyarakat. Mau mengerti keluhan-keluhan dan menanggapi. Dan mereka itu *teges* (tegas).” (wawancara Rabu, 20 Juni 2018).

Beberapa informan mengharapkan pemimpin perempuan yang tetap peduli terhadap masyarakat. Karena perempuan memiliki sifat yang emosional sehingga diharapkan bisa lebih mengerti keadaan masyarakatnya. Selain itu, Indonesia adalah negara demokratis sehingga seorang pemimpin juga harus demokratis dalam menjalankan kepemimpinannya.

Kurt Lewin (dalam Umiarso, 2012:57) mengemukakan kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya

berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan. Hal ini bertujuan agar setiap anggota turut bertanggung jawab, ikut serta dalam segala kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan.

Harapan pemilih pemula adalah pemimpin perempuan memiliki gaya yang demokratis, yaitu tetap kembali dan mementingkan rakyatnya. Seorang pemimpin diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakatnya dan tetap memegang nilai-nilai kejujuran karena semakin banyaknya pemimpin-pemimpin yang tersandung permasalahan korupsi saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Umi Rohmawati (19 tahun). Ia mengharapkan pemimpin perempuan yang memiliki sifat jujur dan adil sehingga memiliki pengaruh besar terhadap rakyatnya.

Harapan lain terhadap gaya kepemimpinan pemimpin perempuan disampaikan oleh Fadzilah Lailatus Sa'adah (19 tahun). Ia mengharapkan pemimpin perempuan yang:

“Dia bisa tegas, dia bisa membenahi fasilitas-fasilitas yang ada. Kalo bisa kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terus yang pasti dia bisa memahami dan mensejahterakan masyarakat.”

Fadzilah berharap pemimpin perempuan mampu bersikap tegas. Juga dapat mewujudkan perbaikan fasilitas-fasilitas sehingga kepemimpinan bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pemimpin perempuan juga harus bisa memahami kepentingan masyarakat dan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemimpin perempuan diharapkan mampu menerima masukan-masukan dari rakyatnya. Menerima nasehat dari gurunya namun tidak serta merta melakukannya begitu saja. Melainkan harus memfilter nasehat-nasehat yang berkaitan dengan masalah kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan golongan. Hal ini seperti harapan Pandu Prabowo (20 tahun) terhadap gaya kepemimpinan dari pemimpin perempuan. Ia menyatakan:

“Yang penting gak ngeyelan, mbantah (membantah), kalo dibilangin kyai, yang takhdim dengan ulama dan menerima masukan-masukan dari rakyat.” (wawancara Minggu, 27 Mei 2018)

Selain gaya kepemimpinan, kepribadian dari seorang pemimpin juga penting. Kepribadian adalah cara individu dalam berinteraksi dengan individu lain. Dalam hal kepemimpinan, kepribadian diperlukan bagi seorang pemimpin untuk berinteraksi dengan masyarakatnya. Dalam kepemimpinan, dikenal adanya teori sifat (*trait theory*). Teori ini mengemukakan bahwa efektifitas kepemimpinan bergantung pada karakter pemimpin. Sifat

yang dimiliki antara lain kepribadian, keunggulan fisik, dan kemampuan sosial.

Ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki pemimpin menurut Sondang Siagian (1994:75-76) adalah pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, objektivitas, pragmatisme, fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masa depan; sifat inklusif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri relevansi, keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi pendengar yang baik, kapasitas integratif, kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, analitik, menentukan skala prioritas, membedakan yang urgen dan yang penting, ketrampilan mendidik, dan berkomunikasi secara efektif.

Beberapa informan berharap agar pemimpin perempuan memiliki kepribadian yang tegas karena pemimpin perempuan masih dinilai lemah dan kurang tegas dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga ketika menjadi pemimpin, pemilih pemula berharap agar perempuan bisa bersikap lebih tegas. Ketegasan tidak selalu diartikan dengan tindakan-tindakan keras, meskipun terkadang dibutuhkan. Dalam situasi tertentu, ketegasan sangat diperlukan misalnya dalam hal pengambilan keputusan meskipun tidak semua anggota dalam struktur kepemimpinan itu mampu menerima keputusan yang diambil oleh pemimpin. Pemimpin juga harus bisa menindak dengan tegas para bawahannya agar apa yang ditugaskan kepada bawahan dapat dilakukan sesuai dengan rencana.

Harapan tersebut disampaikan oleh Rusiana (21 tahun). Ia mengharapkan kepribadian pemimpin perempuan yang:

“Tegas dan amanah. Terus mampu menjadi *uswatun hasanah*, dan mengabdikan penuh kepada masyarakat.” (wawancara Minggu, 10 Juni 2018)

Informan lain, Milenah (19 tahun) mengharapkan kepribadian dari seorang pemimpin perempuan yang merakyat, tidak sombong, ramah tamah terhadap semua rakyat. Wahid Arbianto (19 tahun) mengharapkan kepribadian pemimpin perempuan yang Tegas, cekatan, langsung bertindak, dan ramah.

Selain itu, pemilih pemula juga berharap seorang pemimpin memiliki kepribadian yang jujur. Kejujuran sangat diperlukan untuk dimiliki seorang pemimpin. Karena kejujuran menjadi bekal yang sangat penting dalam menjalankan kepemimpinan. Tanpa kejujuran, kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik. Kejujuran bisa meliputi kejujuran dalam menyatakan salah apabila melakukan kesalahan dan transparansi disegala bidang. Selain itu, pemimpin harus memberikan contoh atau kepada bawahannya. Jika pemimpin

menginginkan bawahannya jujur, maka ia harus bersikap jujur.

Pandu Prabowo (20 tahun) mengharapkan kepribadian yang cantik dari seorang pemimpin perempuan, ia mengharapkan:

“Kepribadian yang cantik. Misalnya jujur, tanggung jawab, cerdas, seperti itulah mbak pokoknya.” (wawancara Minggu, 27 Mei 2018)

Senada dengan pernyataan Surya Ma'ruf (19 tahun) yang berharap bahwa pemimpin perempuan memiliki kepribadian yang “...tegas, jujur, amanah, cerdas, berpengalaman. Cerdas itu yang paling utama, pengalaman, prestasi, itu”.

Beberapa informan berharap bahwa pemimpin perempuan mampu mengayomi dan memperhatikan masyarakatnya. Karena perempuan memiliki sifat yang emosional, maka perempuan dinilai lebih peka dalam memahami kondisi masyarakatnya. Selain itu, perempuan juga harus memiliki kewibawaan. Dengan kewibawaan, pemimpin lebih mudah dalam menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan pernyataan Umi Rohmawati (19 tahun). Ia mengharapkan kepribadian pemimpin perempuan yang:

“Mampu memimpin dengan baik, dengan kepribadian yang berwibawa, pandai bersosial dengan masyarakat dan tidak pernah melakukan tindakan korupsi.” (wawancara Rabu, 30 Mei 2018)

Astri Qurrota'ayunnina (19 tahun) berharap pemimpin perempuan dengan kepribadian yang:

“Bisa mengayomi masyarakatnya, memperhatikan keadaan dan suasana di daerah dan bisa bertanggung jawab dengan omongannya, jujur, dan adil.” (wawancara Senin, 11 Juni 2018)

M. Fikri Nugroho (20 tahun) mengharapkan kepribadian yang sederhana dari pemimpin perempuan dan bisa menempatkan diri dalam berbagai situasi. Ia menyatakan:

“Yang sederhana saja. *Pie amrih iso* (bagaimana bisa) menempatkan *wayahe* (waktu) di undang *iku pie* (itu bagaimana).” (wawancara Rabu, 20 Juni 2018)

Dari berbagai pendapat pemilih pemula di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian yang diharapkan dari seorang pemimpin perempuan adalah secara umum normatif. Mereka berharap pemimpin perempuan memiliki kepribadian yang umum layaknya pemimpin laki-laki. Tidak ada harapan yang spesifik mengenai kepribadian pemimpin perempuan yang disampaikan. Kepribadian yang diharapkan diantaranya jujur, tanggung jawab, lebih merakyat, cekatan, tidak melakukan korupsi,

dan memenuhi janji-janji yang telah diucapkan. Dimana kepribadian tersebut adalah harapan umum dari masyarakat terhadap pemimpin baik itu laki-laki maupun perempuan.

Menjadi seorang pemimpin tentu tidak mudah. Karena apapun yang dilakukan oleh pemimpin menjadi panutan bagi anggota bawahannya. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena kinerja yang baik akan memotivasi anggotanya untuk memiliki kinerja yang baik pula. Berikut adalah harapan pemilih pemula terhadap kinerja pemimpin perempuan.

Menjadi pemimpin tentunya harus memiliki program kerja yang menjadi patokan dalam menjalankan kepemimpinannya sehingga diperlukan adanya visi dan misi. Visi dan misi sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena dengan visi, pemimpin tahu kemana arah jalan kepemimpinan dengan menerapkan langkah-langkah strategis yang sudah dituangkan dalam misinya. Hal tersebut seperti pernyataan Rusiana (21 tahun) yang mengharapkan kinerja pemimpin perempuan yang:

“Amanah, tanggung jawab, tegas dalam memimpin, punya visi dan misi yang jelas.” (wawancara Minggu, 10 Juni 2018)

Harapan serupa disampaikan oleh Umi Rohmawati (19 tahun), ia mengharapkan pemimpin perempuan yang:

“Memiliki target atau pokok kerja yang bisa membuat rakyat sejahtera dan tidak ada ketimpangan sosial di dalamnya. (wawancara Rabu, 30 Mei 2018).

Menjadi pemimpin, terutama perempuan harus memiliki ketegasan. Selama ini perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah. Maka ketika menjadi pemimpin, perempuan harus bisa tegas agar bisa mengkoordinasi anggota-anggotanya. Terutama dalam pengambilan keputusan, pemimpin perempuan perlu memiliki ketegasan karena banyak tantangan yang dihadapi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh M. Fikri Nugroho (21 tahun) yang berharap bahwa pemimpin perempuan memiliki kinerja yang:

“Tegas. Sekarang kan banyak yang *sakkarepe dewe* (seenaknya sendiri). Rakyat kan juga butuh orang yang tegas. Biar bisa hidup sejahtera.” (wawancara Rabu, 20 Juni 2018).

Menurut Fikri, pemimpin perempuan harus tegas karena saat ini banyak pemimpin yang berperilaku sesuai kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku. Ia berpendapat bahwa rakyat membutuhkan orang yang tegas misalnya dalam hal pengambilan keputusan dengan harapan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Selain itu juga perempuan diharapkan mampu memecahkan masalah dengan efektif dan efisien. Efektif adalah penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan efisien adalah penggunaan sumber daya yang minimum untuk mencapai hasil yang optimum. Menjadi pemimpin tentunya akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang membutuhkan waktu singkat untuk penyelesaiannya. Sehingga pemimpin perempuan diharapkan mampu tanggap dalam penyelesaian masalah tersebut agar tidak berlarut-larut dan dapat menangani permasalahan yang lain yang belum terselesaikan.

Hal ini seperti pernyataan Muhammad Atta Amar (18 tahun) yang mengharapkan kinerja dari pemimpin perempuan yang bisa menyelesaikan masalah dengan tanggap dan tidak melakukan tindakan korupsi. Ia mengungkapkan:

“Harapan saya ya kalo nyelesaikan permasalahan cepet, efisien, gak berbelit-belit. Kalo bisa sih gak ada korupsi.” (wawancara Kamis, 21 Juni 2018).

Pemimpin perempuan juga harus bisa profesional. Apalagi selain menjadi pemimpin, perempuan juga mempunyai tugas sebagai ibu rumah tangga yang merupakan kodratnya menjadi seorang perempuan. Profesional adalah orang-orang yang menjalankan profesinya sesuai dengan bidang keilmuannya. Menjadi profesional, seseorang harus memiliki *skill*, *knowledge*, dan *attitude* yang baik. Salah satu sikap yang menunjukkan profesional adalah mampu menempatkan diri di berbagai situasi sesuai dengan penempatannya.

Menjadi pemimpin, perempuan tentunya tidak lepas dari kodratnya menjadi perempuan. Artinya, selain menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, perempuan menjadi pemimpin juga harus menjalankan tugas selayaknya menjadi pemimpin. Pemimpin perempuan diharapkan dapat mengemban tugasnya dengan baik, yang tetap amanah terhadap jabatan yang diembannya dan memiliki kinerja sesuai dengan apa yang dijanjikannya kepada masyarakat sehingga terwujud kinerja yang positif. Sesuai dengan harapan Fadzilah Lalilatus Sa'adah (19 tahun), ia menyatakan pemimpin perempuan harus:

“... bisa profesional, tahu tempat, dan jangan sampai membawa perasaan ke pekerjaan.” (wawancara Kamis, 21 Juni 2018)

Menjadi seorang pemimpin tentunya melewati tahapan-tahapan mencapai posisi pemimpin tersebut salah satunya yaitu pemilihan umum. Dalam masa-masa kampanye pemilihan umum, para kandidat pasti menyampaikan visi dan misi serta janji-janjinya yang disampaikan ke masyarakat. pemilih pemula berharap

ketika jabatan pemimpin sudah dicapai maka pemimpin harus menepati janji-janji yang telah diucapkannya.

Harapan tersebut seperti yang disampaikan oleh Astri Qurrota'ayunnina (19 tahun). Ia mengharapkan kinerja pemimpin perempuan yang "Sesuai janji-janji yang diungkapkan." Juga didukung dengan pernyataan dari Milenah (19 tahun) yang mengharapkan pemimpin perempuan bisa menepati janji-janji sewaktu pilkada, tidak hanya sekedar janji manis belaka.

Perempuan memang identik dengan sifat-sifatnya yang lembut dan lebih lemah daripada laki-laki. Sehingga perempuan kurang mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan pemimpin yang identik dengan kerja keras dan membutuhkan ketegasan. Terlepas dari itu semua, tidak ada jaminan bahwa laki-laki lebih baik dalam menjalankan kepemimpinan. Karena pada dasarnya dalam memimpin banyak aspek-aspek yang menunjangnya. Bukan hanya kondisi fisik saja.

Seperti yang disampaikan oleh Surya Ma'ruf (19 tahun) yang berharap bahwa antara pemimpin perempuan mampu melebihi kinerja laki-laki agar bisa membuktikan bahwa perempuan layak menjadi pemimpin. Ia mengharapkan kinerja kepemimpinan perempuan yang pastinya bisa melebihi laki-laki. Harus bersinergi dan tidak individualis.

Selain gaya kepemimpinan, kepribadian, dan kinerja, penyelenggaraan pemerintahan oleh perempuan juga penting. Bagaimana nantinya perempuan membawa arah kepemimpinannya. Penyelenggaraan pemerintahan adalah mekanisme atau cara eksekutif menjalankan kekuasaannya. Berikut adalah hasil wawancara tentang harapan pemilih pemula terhadap penyelenggaraan pemerintahan jika dipimpin oleh pemimpin perempuan:

M. Fikri Nugroho (20 tahun) dan Rusiana (21 tahun) berharap bahwa pemimpin perempuan mampu menjalankan pemerintahannya sesuai dengan aturan. Rusiana berharap terwujudnya penyelenggaraan "Pemerintahan yang sesuai dengan aturan agama dan negara." (wawancara Minggu, 10 Juni 2018). Sedangkan M. Fikir Nugroho berharap:

"Sekarang kan kebanyakan toleransi, jadi *normane* (normanya) disepelekan. Paling tidak mereka mengerti mana itu yang benar dan salah. Mereka kan tau aturan. Sebelum menjalankan kan mereka sudah membaca." (wawancara Rabu, 20 Juni 2018)

Beberapa pemilih pemula berharap bahwa pemimpin perempuan mampu menjalankan pemerintahan dengan adil, tidak ada tindakan korupsi, dan tidak ada diskriminasi. Hal ini sesuai dengan harapan Surya Ma'ruf (19 tahun) yang mengharapkan bahwa pemimpin perempuan mampu Tegas, adil, sama rata, tidak membedakan. Fadzilah Lailatus Sa'adah (19 tahun)

berharap "Jangan ada KKN, di bidang apapun. Udah itu aja." (wawancara Kamis, 21 Juni 2018).

Sependapat dengan Fadzilah, Umi Rohmawati (19 tahun) berharap dari pemimpin perempuan akan:

"Tercipta daerah yang makmur, mampu menaungi rakyat dengan baik, tidak ada diskriminasi sosial, tidak ada ketimpangan sosial, dan tidak ada tindakan korupsi." (wawancara Rabu, 30 Mei 2018)

M. Rifa'i (17 tahun) dan Eko Susilo (17 tahun) juga berharap terciptanya pemerintahan yang *luberjurdil*. Sebagai negara demokrasi, pemilih pemula tentu juga mengharapkan pemerintahan yang berjalan demokratis. Hal ini senada dengan harapan Astri Qurrota'ayunnina (19 tahun) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Harapan tersebut serupa dengan harapan Muhammad Atta Amar (18 tahun) yang mengungkapkan:

"Ya demokratis itu. Jadi minta pendapat dari rakyat, nanti disaring dijadiin lebih baik. Berdiskusi sama rakyat. Dan harus tegas. Kalo emang udah gak bisa ya pemerinahnya harus ngambil solusi yang bagus." (wawancara Kamis, 21 Juni 2018)

Pandu Prabowo (20 tahun) mengharapkan pemerintahan dari pemimpin perempuan yang demokratis tentunya, namun *takdhim* yang kyai. Riska Mardiana (21 tahun) berharap juga bahwa pemimpin perempuan mampu mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi tinggi untuk rakyatnya.

Dari berbagai harapan diatas, pemilih pemula mengharapkan terwujudnya pemerintahan yang demokratis, tetap memperhatikan kebutuhan dan berbagai permasalahan rakyatnya. Karena sesungguhnya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kedua, mewujudkan pola pikir masyarakat yang kreatif. Kehidupan manusia selalu diikuti oleh perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Perubahan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat karena mereka harus berkembang menuju kehidupan yang lebih baik. Manusia memiliki rasa tidak puas terhadap suatu keadaan menuntut adanya perbaikan dengan melakukan perubahan tersebut. Sehingga diperlukan adanya pemimpin yang mampu mengkoordinir anggota masyarakatnya untuk bergerak melakukan suatu perubahan. Berbagai aspirasi dari masyarakat ditampungnya kemudian dirumuskan dalam suatu program kerja sehingga menjadi acuan dalam menjalankan kepemimpinan.

Ekonomi dalam suatu negara sangat penting untuk diperhatikan karena menyangkut kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo menyampaikan harapannya terhadap adanya

perubahan di bidang ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Umi Rohmawati (19 tahun) yang berharap pemimpin perempuan mampu:

“Menjadikan rakyat yang memiliki daya atau pola pikir yang kreatif, memberikan UKM-UKM agar masyarakat tidak menganggur atau tanpa pekerjaan.” (wawancara Rabu, 30 Mei 2018)

M. Fikri Nugroho (20 tahun) juga mengharapkan adanya perubahan di bidang ekonomi. Ia menyatakan bahwa:

“Yang terpenting itu sekarang yang dibutuhkan ekonomi rakyatnya. Yang bagaimana seorang pemimpin itu bisa memutar roda. Kita kan diajarkan bagaimana bisa saling berbagi.” (wawancara Rabu, 20 Juni 2018).

Muhammad Atta Amar (18 tahun) juga berharap serupa, ia menyatakan bahwa:

“Saya ngarepinnya di ekonomi. Contohnya di wilayah kita aja, pembangunan ekonominya itu bisa maju gitu lo. Jadi rakyatnya bisa makmur. Misalkan ada yang pengangguran, itu coba dikasih sosialisasi misalnya buat penampungan kerja gitu.” (wawancara Kamis, 21 Juni 2018)

Surya Ma'ruf (19 tahun) berharap adanya perubahan di bidang ekonomi juga. Ia menyatakan bahwa:

“Ya pasti segi ekonomi mbak ya, Indonesia sekarang kan rupiah melemah, semua-semua naik, maka dari itu ya harus ada lapangan-lapangan kerja baru. Karena di Indonesia sendiri banyak pengangguran-pengangguran dan malah lebih memperhatikan tenaga-tenaga asing.” (wawancara Rabu, 20 Juni 2018)

M. Rifa'i (17 tahun) juga mengharapkan peningkatan ekonomi yang semakin pesat. Memang masalah pengangguran saat ini masih belum bisa teratasi. Pemilih pemula berharap dengan adanya pemimpin perempuan mampu membawa perubahan di bidang ekonomi dengan menjadikan masyarakat yang memiliki pola pikir lebih baik, memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Mindset masyarakat sekiranya perlu diubah dari mencari pekerjaan menjadi pencipta pekerjaan sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.

Ketiga, pemanfaatan IOT (*Internet of Thinking*) dengan Adanya *Smart City*. Di bidang pendidikan, Fadzilah Lailatus Sa'adah (19 tahun) berharap bahwa adanya inovasi di bidang pendidikan dan tata kota lebih diperhatikan. Ia mengungkapkan bahwa:

“Kalo saya sih mending dia bisa menciptakan inovasi-inovasi di bidang pendidikan yang bagus sesuai tuntutan zaman. Sesuaikan dengan karakter anak-anak itu. Saya pengennya smart city,

sekarang kan jamannya sudah ada IOT, Internet of Think. Jadi saya pengennya siapapun pemimpinnya, kita bisa mencoba IOT itu. Kalo kita ada kesempatan kenapa kita gak mencoba gitu. Terus lagi ada green city, jadi kaya adiwiyata gitu. Terus penganggurannya tu, banyak kan lulusan S1 yang pekerjaannya gak sesuai dengan lulusannya, jadi mungkin bisa mendirikan sebuah training, pelatihan sesuai dengan jurusan yang diprogramnya. Jadi sebelum menemukan pekerjaan yang cocok untuk kita, itu kita bisa menciptakan pekerjaan sendiri.” (wawancara Kamis, 21 Juni 2018).

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan dan harapan pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo terhadap pemimpin perempuan. Berdasarkan data yang telah dianalisis maka akan dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian mengenai persepsi pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo terhadap pemimpin perempuan. Rumusan masalah akan dianalisis menggunakan teori persepsi Brunner. Teori ini akan menjelaskan proses pengambilan keputusan yang terdapat empat tahapan yaitu kategori primitive, mencari tanda, konfirmasi, dan konfirmasi tuntas.

Persepsi pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo terhadap pemimpin perempuan sangat beragam. Pemilih pemula dengan berbagai latar belakang pendidikan memberikan tanggapan dan menyampaikan harapannya terhadap pemimpin perempuan. Pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo menganggap perempuan mampu menjadi pemimpin. Tanggapan tersebut menunjukkan adanya netral gender yaitu keadaan yang tidak memandang adanya perbedaan laki-laki dan perempuan.

Dari kedua indikator yang telah dipersepsi oleh pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo, secara keseluruhan pemilih pemula memiliki persepsi yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan prinsip persepsi yaitu persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi.

Berdasarkan teori persepsi Brunner, proses pengambilan keputusan memiliki empat tahap yaitu kategoris primitif, mencari tanda, konfirmasi, dan konfirmasi tuntas. Persepsi seseorang diperoleh dengan melakukan kategorisasi yang ditandai dengan ciri-ciri khusus kemudian diperkuat dengan informasi-informasi tambahan. Itulah sebabnya meskipun dalam situasi yang sama, masing-masing pemilih pemula memiliki persepsi yang berbeda. Sehingga dalam memberikan persepsi, seseorang harus cermat dalam memperhatikan tanda-

tanda dan informasi mengenai objek/peristiwa agar persepsi bisa dilakukan secara tepat.

Pertama, kategorisasi primitif yaitu objek atau peristiwa diamati, diisolasi, dan ditandai berdasarkan ciri-ciri khusus. Pada tingkat ini, pemberian arti pada objek persepsi masih sangat minim. Proses kategorisasi primitif dalam penelitian ini dapat dilihat dari pemilih pemula yang memberikan keterangannya mengenai arti pemimpin. Pemimpin digambarkan sebagai sosok yang dipercaya untuk menggerakkan, mengkoordinasi, dan mempengaruhi orang yang dipimpinya.

Tahap kedua, mencari tanda (*cue search*) yaitu pengamat secara cepat memeriksa (*scanning*) lingkungan untuk mencari informasi-informasi tambahan yang memungkinkannya melakukan kategorisasi yang tepat. Dalam penelitian ini, pemilih pemula mendapatkan informasi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang notabene masing-masing dari kandidat memiliki wakil perempuan adalah dari media sosial, banner, spanduk, bahkan dari kyai atau ustadnya.

Tahap ketiga, konfirmasi yaitu terjadi setelah objek mendapatkan penggolongan sementara. Pada tahap ini pengamat tidak lagi terbuka untuk sembarang masukan, melainkan hanya menerima tambahan informasi yang akan memperkuat (mengkonfirmasi) keputusannya. Pada tahap konfirmasi, pemilih pemula mendapatkan informasi seputar pemimpin perempuan dari media massa dan dari kyainya sehingga mereka dapat tambahan informasi. Pemilih pemula berpandangan bahwa perempuan juga mampu menjadi pemimpin. Namun terhadap perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah, mayoritas memiliki persepsi yang positif dan hanya beberapa yang memiliki persepsi negatif.

Tahap keempat, konfirmasi tuntas yaitu diakhirinya proses pencarian tanda-tanda. Tanda-tanda baru diabaikan dan tanda-tanda yang tidak konsisten dengan kesimpulan yang sudah dibuat juga diabaikan atau diubah sehingga cocok dengan kategori yang sudah dipilih. Pada tahap ini, pemilih pemula sudah bisa memberikan pandangan mengenai perempuan yang menjabat sebagai pemimpin kepala daerah. Menurut pandangan pemilih pemula di Kabupaten Ponorogo, tidak ada masalah ketika perempuan menjadi pemimpin asalkan dia mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.

Penerapan teori persepsi oleh pemilih pemula ditandai dengan dilakukannya tahapan-tahapan persepsi sesuai yang disampaikan oleh Jerome S. Brunner. Sebelum mempersepsi objek, pemilih pemula harus memahami objek yang akan dipersepsi tersebut dalam hal ini adalah mengenai pemimpin perempuan. Kemudian pemilih pemula mencari informasi tambahan mengenai objek persepsi dan mulai membatasi informasi-informasi yang

didapat yang bisa mendukung kesimpulan yang akan diambil. Setelah itu pada tahap terakhir, pemilih pemula melakukan identifikasi tanda-tanda atau informasi yang dirasa mendukung kesimpulan yang sudah dibuat dan mengabaikan tanda-tanda yang tidak sesuai atau tidak memperkuat persepsinya.

Dari tahapan-tahapan yang dilalui oleh pemilih pemula dalam mempersepsi pemimpin pemula dapat diambil kesimpulan bahwa teori persepsi Brunner mendukung penelitian ini sehingga dapat diketahui bahwa dalam proses persepsi, pemilih pemula melewati tahapan-tahapan sesuai dengan yang disampaikan oleh Brunner dalam teorinya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, Tanggapan pemilih pemula terhadap pemimpin perempuan diantaranya: perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam menjadi pelaku kepemimpinan, pemimpin perempuan juga bukan hal yang lazim karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, perempuan lebih baik menjadi pendamping atau pelengkap dalam kepemimpinan, dan perempuan sebagai sosok emosional

Kedua, Harapan pemilih pemula terhadap pemimpin perempuan yaitu terwujud gaya kepemimpinan yang demokratis dan tegas; kepribadian yang tegas, jujur, dan bisa mengayomi masyarakatnya; kinerja yang tegas, memiliki visi dan misi, efektif dan efisien dalam memecahkan masalah, profesional, komitmen terhadap janji-janjinya, dan kinerja yang lebih baik daripada laki-laki; adanya perubahan sosial di bidang ekonomi dan pendidikan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sehingga pemimpin perempuan harus sempurna.

Saran

Pertama, Perlu adanya pemahaman yang lebih mengenai gender sehingga meminimalisir adanya ketidakadilan gender terutama bagi kaum perempuan

Kedua, Terbukanya ruang bagi perempuan untuk menunjukkan eksistensinya dan mampu membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Cakrawalanewsco. 2017. *KPU Jawa Timur Tetapkan DPT Pilgub Jawa Timur*, (Online), (<http://cakrawalanews.co/2017/09/11/kpu-Jawa>)

Timur-tetapkan-dpt-pilgub-Jawa Timur/, diakses 13 Januari 2018).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Ponorogo. *Anggota*, (Online), (<https://www.dprd-ponorogo.go.id/index.php/anggota/>), diakses 23 Januari 2018).

Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo. <https://ponorogo.go.id/sejarah/ponorogo> (diakses 4 Juli 2018).

Handayani, Maulida Sri. *Kepemimpinan Perempuan dan Dinasti Politik*, (Online), (<https://tirto.id/kepemimpinan-perempuan-dan-dinasti-politik-Gfr>), diakses 23 Januari 2018).

Kartono, Kartini. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Lexy, J. Moleong. 2005. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2012. Sekretariat Negara: Jakarta.

Sarwono. Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Setiajid. 2011. *Orientasi Politik Yang Mempengaruhi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010 (Studi Kasus Pemilih Pemula Di Kota semarang)*. Semarang: Universitas Negeri Surabaya.

Siagian, P. Sondang. 1994. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Subhan, Zaetunah. 2004. *Qodrat Perempuan Takdir atau Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umiarso dan Baharuddin. 2012. *Kepemimpinan Pendidikan Islam, Antara Teori dan Praktik*. Ar Ruzz Media.

Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.